KAJIAN PELAKSANAAN PELELANGAN KAYU MERANTI DI KALIMANTAN TIMUR *Study on The Implementation of Meranti Wood Auction in East Kalimantan*

Catur Budi Wiati¹⁾

¹⁾ Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Samarinda
Jl. A.W. Syahrani No.68 Sempaja, Samarinda; Telepon. (0541) 206364, Fax (0541) 742298
Email: caturbudiwiati@gmail.com

Diterima 1 Mei 2012, direvisi 20 Mei 2013, disetujui 27 Mei 2013

ABSTRACT

The policy of wood auction including meranti had been changed many times from SK Menhut No. 319/Kpts-II/1997 successively to be Permenhut No. P.02/Menhut-II/2005, and the last Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, is expected to accelerate the process of wood auction. This article has an aim to know the implementation of meranti wood auction in East Kalimantan after the guideline for the implementation of wood auction has been changed and at the same time to know its existing problems. Results of research show that government got income approximately Rp 35 billion in year 2006 and Rp 17 billion in year 2007 from wood auction including meranti in Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda/State Property and Auction Office of Samarinda. This value not included value of goods auction for non wood such as motor ship and truck. However the implementation of wood auction in East Kalimantan still does not operate maximally because of lack of funding to handling illegal logging, the limited amount of Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) in forestry institution and weak of coordination between institutions related to handling management of wood auction.

Keywords: wood auction, meranti, policy change, forestry institution

ABSTRAK

Kebijakan pelelangan kayu termasuk kayu meranti telah mengalami beberapa kali perubahan dari SK Menhut No. 319/Kpts-II/1997 direvisi menjadi Permenhut No. P.02/Menhut-II/2005, dan yang terakhir menjadi Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, dengan harapan dapat mempercepat proses pelelangan kayu. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan kayu meranti di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007 dari hasil pelelangan kayu termasuk meranti di KPKNL Samarinda. Nilai ini tidak termasuk nilai lelang barang-barang bukan kayu seperti kapal motor dan truk. Namun demikian pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan pendanaan untuk menangani masalah illegal logging, terbatasnya jumlah PPNS di institusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menangani pelelangan kayu.

Kata kunci: pelelangan kayu, meranti, perubahan kebijakan, dinas kehutanan

I. PENDAHULUAN

Produksi kayu hutan alam Kalimantan Timur yang umumnya didominasi jenis dipterokarpa merupakan penyumbang terbesar dari total produksi kayu hutan alam Indonesia. Data dari Departemen Kehutanan (2007) melaporkan bahwa total produksi kayu bulat Indonesia asal hutan alam tahun 2006 adalah 5.586.722 m³, sekitar 1.987.444 m³ berasal dari

Kalimantan Timur. Namun demikian, penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) yang terjadi di Kalimantan Timur juga cukup besar. Data dari Kotijah (2006) melaporkan bahwa kasus terkait ilegal logging yang ditangani Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur sepanjang tahun 2004 terjadi sekitar 103 kasus, tahun 2005 terjadi 237 kasus dan tahun 2006 terjadi 45 kasus. Tahun 2007 jumlah tersebut

kembali meningkat menjadi 432 kasus (Elshinta, 2008). Jumlah ini menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat *illegal logging* cukup besar, terlebih jika kayu hasil penangkapan tidak segera dilakukan pelelangan.

Untuk tujuan mempercepat proses pelaksanaan pelelangan kayu demi mengamankan barang bukti dan menjaga hak-hak negara dari kerugian akibat pencurian, kerusakan, penyusutan dan penurunan kualitas karena penyimpanan dalam waktu yang lama, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan pelaksanaan pelelangan kayu dari SK Menhut No.319/Kpts-II/1997 menjadi Permenhut No.P.02/Menhut-II/2005, dan terakhir direvisi menjadi Permenhut P.48/Menhut-II/2006.

Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan diantaranya adalah pengurangan jumlah peserta lelang, pembentukan panitia lelang di instansi kehutanan serta penggunaan Surat Angkutan Lelang (SAL) sebagai dokumen angkut. Bila dicermati, perubahan kebijakan tersebut tidak hanya bermaksud untuk mempercepat proses pelaksanaan pelelangan dengan menyederhanakan aturan pelelangan tetapi juga membuka peluang keterlibatan instansi di luar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam proses pelaksanaannya.

Penyederhanaan aturan pelaksanaan pelelangan maupun pelibatan instansi di luar

KPKNL belum dapat dipastikan akan meningkatkan jumlah proses lelang maupun volume kayu yang dilelang. Kurang siapnya instansi di luar KPKNL untuk bekerja dalam masalah pelaksanaan pelelangan kayu, lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat, dan minimnya pendanaan seringkali menjadi penyebab pelaksanaan pelelangan kayu tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya negara akan mengalami kerugian akibat hilangnya nilai ekonomis dari hasil hutan temuan, sitaan atau rampasan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur sekaligus untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Perubahan kebijakan pelaksanaan pelelangan kayu yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian negara akibat proses pelelangan yang sebelumnya sangat memakan waktu. Namun demikian, seringkali permasalahan tidak saja terletak pada kesalahan substansi kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketidaksiapan instansi yang melaksanakan, lemahnya koordinasi antar instansi dan minimnya dana seringkali menjadi kendala suatu kebijakan untuk dijalankan.

Sumber : Diolah penulis untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
Figure 1. Research Framework

Tabel 1. Matriks Jenis dan Uraian Data, Metoda Pengumpulan dan Analisis Data
Table 1. *Matrix of Type and Data Description, Data Gathering and Data Analysis Method*

Nomor (Number)	Jenis dan Uraian Data (Type and Data Description)	Metoda Pengumpulan Data (Data Gathering Method)	Metoda Analisis Data (Data Analysis Method)
I. DATA PRIMER			
1.	Pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur: - Alur proses pelaksanaan pelelangan - Peran masing-masing instansi pemerintah yang terlibat	Observasi, wawancara dan studi literatur	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif
2.	Permasalahan dalam pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur: - Sumberdaya manusia - Pembiayaan - Koordinasi antar instansi	Wawancara dan studi literatur	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif
II. DATA SEKUNDER			
1.	Data terkait aturan perundangan pelaksanaan pelelangan	Studi literatur	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif
2.	Dokumen-dokumen resmi dari instansi terkait tentang kegiatan pelelangan kayu di Kalimantan Timur	Studi literatur	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif
3.	Hasil penelitian dan publikasi lain tentang pelelangan kayu di Kalimantan Timur	Studi literatur	Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara kualitatif

Sumber : Diolah penulis untuk memperjelas jenis, metoda pengumpulan dan analisis data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penatausahaan Kayu Lelang dan Perubahannya

Kebijakan pelaksanaan pelelangan kayu sebelumnya diatur oleh SK Menhut No. 319/Kpts-II/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 51/KMM.01/1997, No. 72/Kpts-VI/1997, Kep. 010/JA/2/1997, No. Pol. Kep/01/I/1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas Jenis Kayu selain Rimba Campuran. Kebijakan ini kemudian diganti menjadi Permenhut No.P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Hanya berselang sekitar 1,5 tahun sejak diberlakukan, Permenhut No.P.02/Menhut-II/2005 kemudian direvisi

kembali dengan Permenhut P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam Permenhut P.48/Menhut-II/2006 antara lain adalah:

1. Pembatasan kubikasi jumlah kayu lelang yaitu maksimal 100 m³ untuk peserta lelang perorangan dan minimal 100 m³ untuk peserta lelang berupa badan usaha.
2. Untuk hasil hutan sitaan, proses pelelangan tetap berjalan meski tidak mendapat persetujuan atau tidak disaksikan oleh pihak tersangka dan kuasa hukumnya.
3. Atas persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota, membentuk panitia lelang di instansi yang menangani bidang kehutanan.

4. Perubahan istilah harga dasar lelang menjadi harga limit lelang, dimana harga limit lelang tidak hanya berdasarkan kewajaran harga penawaran peserta lelang tetapi juga berdasarkan wilayah atau lokasi dimana hasil hutan akan dilelang;
 5. Perubahan istilah biaya pengganti menjadi biaya persiapan lelang dan dijabarkan lebih detil misalkan untuk biaya-biaya rapat, biaya pemasangan pengumuman dan lain-lain.
 6. Pemanfaatan biaya honor bagi pihak-pihak yang berjasa sebesar 25% dari biaya persiapan lelang diserahkan kepada instansi pemohon lelang.
 7. Penggunaan Surat Angkutan Lelang (SAL) untuk pengangkutan kayu hasil lelang.
- Sedangkan beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam Permenhut P.47/Menhut-II/2009 antara lain adalah:

1. Perubahan jumlah peserta lelang, menjadi hanya 2 (dua) peserta yang berasal dari perorangan dan Badan Usaha Milik Negara atau swasta.
2. Perubahan nama instansi pemerintah yang khusus menangani lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
3. Perubahan nilai jaminan uang penawaran lelang menjadi paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari harga limit yang ditetapkan.
4. Penguasaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada pemenang lelang terhadap hasil hutan yang dilelang.

Bila dicermati perubahan kebijakan pelaksanaan pelelangan kayu tidak hanya dilakukan pada penyederhanaan aturan lelang tetapi juga dengan memperbanyak pelibatan instansi daerah dalam proses pelaksanaannya. Ini dapat dilihat dari pemberian kewenangan kepada instansi yang menangani kehutanan untuk membentuk panitia lelang serta membentuk suatu tim yang melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pemantauan atau monitoring lelang.

B. Alur Proses Pelaksanaan Lelang Kayu

Alur kegiatan pelelangan sesuai Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006 dimulai dari pemohon lelang yang mengajukan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL setempat. Pengajuan permohonan berisi informasi berupa: (a) Jumlah batang/keping/bundel, jenis, dan volume hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang akan dilelang; (b) Harga limit lelang; dan (c) Biaya persiapan lelang. Setelah permohonan disetujui oleh KPKNL maka pemohon lelang harus membentuk panitia lelang atas persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

Panitia lelang bertugas membantu dalam proses penilaian administrasi dan penentuan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum pelelangan dilakukan, pemohon lelang mengumumkan pelelangan kepada masyarakat melalui media massa cetak dan atau media elektronik yang dapat menjangkau masyarakat luas.

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon lelang tergantung status hasil hutan yang akan dilelang yaitu:

1. Kepala instansi kehutanan apabila obyek lelang hasil hutan berstatus temuan.
2. Penyidik apabila obyek lelang hasil hutan berstatus sitaan dan kasus dalam proses penyidikan, atau Penuntut Umum apabila berkas penyidikan telah berada di Penuntut Umum.
3. Kepala Kejaksaan Negeri apabila obyek lelang hasil hutan berstatus rampasan.

Permenhut Nomor P.02/Menhut-II/2005 mendefinisikan bahwa hasil hutan temuan adalah hasil hutan yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau diluar hutan yang tidak diketahui identitas pemiliknya atau yang menguasai atau pengangkutannya, baik nama maupun alamatnya. Hasil hutan sitaan adalah hasil hutan yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana, sedangkan hasil hutan rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sumber : Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, diolah

Gambar 2. Alur Proses Lelang Kayu

Figure 2. The Path of Process of Wood Auction

Apabila pelelangan tidak mencapai harga dasar lelang ataupun peserta lelang tidak mencapai batas minimal 3 (tiga) peserta, maka pelelangan diulang sampai 3 (tiga) kali. Apabila pelelangan sudah diulang sampai 3 (tiga) kali namun pelelangan tetap tidak mungkin dilaksanakan sedangkan hasil hutan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka pembelinya ditunjuk langsung oleh Menteri Kehutanan.

Namun apabila hasil hutan tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis dan tidak ada pembeli yang bersedia untuk membeli, sementara hasil hutan tersebut masih dapat dimanfaatkan, maka Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2006 mengatur pemanfaatannya yaitu: (a) Diserahkan untuk Badan Sosial oleh Gubernur Propinsi setempat setelah ada persetujuan Menteri Kehutanan, atau; (b) Diserahkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur Propinsi di propinsi lain yang membutuhkan dan bersifat mendesak akibat bencana alam dan Gubernur yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan.

Selanjutnya penyerahan hasil hutan temuan atau rampasan diberitahukan kepada Menteri Keuangan dan uang hasil lelang hasil hutan langsung disetorkan ke kas negara oleh pemohon lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pelelangan.

C. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pelelangan Kayu di Kalimantan Timur

Menurut dokumen pelaksanaan lelang kayu hasil *illegal logging* yang diperoleh di KPKNL Samarinda, dilaporkan bahwa sepanjang tahun 2006 KPKNL Samarinda telah melaksanakan 29 lelang, sedang pada tahun 2007 sebanyak 31 lelang. Sumber yang sama juga mengemukakan bahwa dari hasil pelaksanaan lelang, sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007 kekayaan negara berupa hasil hutan kayu telah diselamatkan.

Sayangnya dokumen tersebut tidak dapat menjelaskan apakah hasil hutan kayu yang dilelang berupa kayu bulat atau kayu olahan. Dokumen lelang umumnya hanya menyampaikan jenis dan volume kayu,

misalnya kayu berbagai ukuran kelompok meranti sebanyak 6.022 potong.

Hal penting lain adalah barang lelang yang dilaporkan dalam dokumen lelang bukan hanya berupa kayu tetapi juga dapat menyebutkan

barang lelang bukan kayu seperti truck dan kapal motor.

Karena itu kerugian negara akibat *illegal logging* sebenarnya lebih kecil dari nilai yang dilaporkan.

Sumber : Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, diolah

Gambar 3. Alur Proses Lelang Kayu Hasil Hutan Temuan

Figure 3. The Path of Process of Wood Auction from Finding Result

Tabel 2. Data Pelelangan Kayu di KPKNL Samarinda

Table 2. Wood Auction Data in KPKNL Samarinda

Pemohon Lelang (Auction applicant)	2006			2007		
	Jumlah Lelang (Amount of Auction)	Volume Lelang (Auction Volume)* (m ³)	Hasil Lelang (Result of Auction)	Jumlah Lelang (Amount of Auction)	Volume Lelang (Auction Volume)* (m ³)	Hasil Lelang (Result of Auction)
Kehutanan	7	481,300.37	15,233,090,404.70	7	6,717.35	3,505,856,739.28
Kepolisian	12	12,316.50	13,460,250,621.64	16	242,147.02	6,671,445,819.57
Kejaksaan Negeri	10	6,122.94	6,157,882,725.80	8	13,234.15	6,495,715,123.45
Total	29	499,739.82	34,851,223,752.14	31	262,098.52	16,673,017,682.30

*) data tidak termasuk barang lelang bukan kayu

Sumber : diolah dari data primer

Data salah satu contoh dokumen kutipan risalah lelang dari KPKNL Samarinda juga menunjukkan bahwa pemenang lelang kayu di Kalimantan Timur tidak hanya berasal dari Kalimantan Timur tetapi juga Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pelelangan kayu di Kalimantan Timur tidak menemukan kendala dalam mencari peminat lelang seperti yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah yang pernah memiliki hanya satu peserta lelang dalam pelaksanaan pelelangan kayu (Syahadat dan Prahasto, 2005). Padahal Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang terbanyak melakukan pelelangan kayu selain Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pangkalanbun (Kabupaten Kotawaringin Barat), dimana untuk satu kali pelelangan jumlahnya dapat mencapai 3.000 m³ (Tempo Interaktif, 2005).

Hal penting yang dapat dicermati adalah meskipun Dinas Kehutanan Propinsi/ Kabupaten/ Kota telah memiliki kewenangan untuk membentuk panitia lelang, namun dari data di KPKNL Samarinda pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih lebih banyak dilakukan oleh pihak di luar kehutanan. Menurut data tersebut, beberapa pihak dari instansi kehutanan yang menjadi pemohon lelang diantaranya adalah Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa secara umum kurang maksimalnya instansi kehutanan di daerah dalam pelaksanaan lelang hasil hutan temuan maupun sitaan dikarenakan kurangnya dana penanganan *illegal logging*. Dana penanganan *illegal logging* akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan lelang. Hal ini dapat diartikan bahwa jika pemerintah mengalokasikan cukup dana guna penanganan *illegal logging* maka akan banyak hasil hutan temuan dan sitaan yang dapat dilelang. Responden dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara mengemukakan bahwa pada tahun 2005

instansinya sama sekali tidak menangani lelang, dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah daerahnya tidak mengalokasikan dana untuk penanganan *illegal logging*. Namun ketika tahun 2006 pemerintah setempat mengalokasikan dana penanganan *illegal logging* sebesar Rp 800 juta, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyumbang pemasukan negara sebesar Rp 2 milyar dari hasil lelang.

Selain permasalahan dana, penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan pelelangan oleh instansi kehutanan adalah keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Jumlah PPNS yang bekerja di instansi kehutanan di Kalimantan Timur sangat terbatas. Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara misalnya, saat penelitian ini dilakukan, hanya memiliki 1 (satu) orang PPNS. Hal tersebut menyebabkan kasus lelang yang ditangani oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini lebih banyak yang berstatus temuan.

Permasalahan lain yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pelelangan kayu oleh instansi kehutanan adalah lemahnya koordinasi antara instansi kehutanan dengan pihak kepolisian, sehingga menyebabkan sering terjadi tarik ulur kewenangan untuk menjadi pemohon lelang. Tarik ulur kewenangan umumnya disebabkan karena saling kecurigaan akibat ketidakjelasan aturan yang membatasi hasil hutan berupa temuan dan sitaan. Salah satu responden dari instansi kehutanan menganggap bahwa pihak kepolisian hanya mencari alasan dengan menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengalihkan hasil hutan yang berstatus temuan menjadi sitaan. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri tidak memberi batasan waktu yang jelas tentang status DPO ataupun menyampaikan secara resmi tentang daftar DPO terhadap kasus sitaan kepada pihak kehutanan dengan alasan menghindari kebocoran informasi yang berdampak pada gagalnya penanganan kasus hukum.

Tidak jelasnya batasan waktu status DPO dari pihak kepolisian menyebabkan hasil hutan seringkali sudah mengalami kerusakan akibat terlalu lama dibiarkan terkena panas dan hujan.

Hasil hutan yang sudah rusak jelas akan mengalami penurunan nilai ekonomis karena saat dilelang akan sulit mencari pihak yang membeli dengan mengikuti lelang. Hasil hutan yang sudah diproses lelang tetapi tidak mendapatkan pembeli dikarenakan kondisinya sudah rusak dapat dikatakan merugikan negara. Hal ini dikarenakan negara telah mengeluarkan biaya persiapan lelang melalui instansi yang melakukan permohonan lelang tetapi negara tidak mendapatkan hasil lelang. Dengan berlakunya Permenhut P.47/Menhut-II/2009 menggantikan Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006, selain kerugian biaya persiapan lelang, negara juga mengalami kerugian berupa PSDH dan DR atas hasil hutan yang dilelang jika lelang sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendapatkan pembeli.

Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tidak memiliki data resmi yang melaporkan berapa nilai hasil hutan yang dapat terselamatkan melalui hasil lelang. Hal tersebut dikarenakan instansi kehutanan tidak mendapat pelaporan tentang jumlah lelang kayu baik berupa temuan, sitaan maupun rampasan yang telah dilakukan KPKNL. Kebijakan penata-usahaan yang ada saat ini belum mengatur tentang mekanisme pelaporan lelang kayu dari KPKNL yang melakukan lelang ke pemerintah daerah. Masing-masing KPKNL yang ada di Kalimantan Timur yaitu KPKNL Samarinda, KPKNL Balikpapan dan KPKNL Tarakan secara reguler hanya melaporkan data tentang lelang kepada Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apalagi jika Dinas Kehutanan Propinsi tidak membentuk tim pemantauan/monitoring seperti yang terjadi di Kalimantan Timur seperti saat penelitian ini dilakukan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sepanjang tahun 2006 KPKNL Samarinda telah melaksanakan 29 lelang, sedang pada tahun 2007 sebanyak 31 lelang. Dari hasil pelaksanaan lelang, sekitar Rp 35 milyar pada tahun 2006 dan Rp 17 milyar pada tahun 2007

kekayaan negara berupa hasil hutan kayu telah diselamatkan. Nilai tersebut belum memasukkan nilai dari barang lelang bukan kayu seperti truck dan kapal motor.

Pelaksanaan kebijakan lelang kayu di Kalimantan Timur masih belum berjalan maksimal dikarenakan minimnya dana penanganan *illegal logging* di daerah, terbatasnya jumlah PPNS di instansi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar instansi di daerah yang menangani pelaksanaan pelelangan kayu.

B. Saran

Potensi nilai hasil lelang yang besar dari Propinsi Kalimantan Timur seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah dengan memberikan alokasi dana yang cukup bagi instansi kehutanan untuk menangani ilegal logging, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait.

Agar instansi kehutanan memiliki data mengenai nilai hasil hutan yang dapat diselamatkan melalui hasil lelang maka kebijakan pelelangan kayu seharusnya mengatur sistem pelaporan data hasil lelang dari KPKNL kepada Dinas Kehutanan Propinsi setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan, 2007. Statistik Kehutanan Indonesia 2006. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan. Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan.
- Elshinta, 2008. Sepanjang 2007 terdapat 342 kasus ilegal logging di Kaltim. Diakses dari <http://www.elshinta.com> tanggal 27 April 2012.
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 51/KMM.01/1997, Nomor 72/Kpts-VI/1997, Kep. 010/JA/2/1997, Nomor Pol. Kep/01/I/1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas Jenis Kayu selain Rimba Campuran.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 319/Kpts-II/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Lelang Kayu

- Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran. Departemen Kehutanan Kotijah, 2006. Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek Ilegal Logging di Kalimantan Timur. Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 2 No.1, Juni 2006. Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan. Kementerian Kehutanan.
- Syahadat E. dan Hendro Prahasto, 2005. Kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Hasil Sitaan dan Temuan: Studi Kasus di Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah. Info Sosial Ekonomi Vol.5 No.1 Tahun 2005. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan.
- Tempo Interaktif, 2005. Pemerintah Upayakan Percepat Lelang Kayu. Sabtu, 02 April 2005. Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2005/04/02/05658969/Pemerintah-Upayakan-Percepat-Lelang-Kayu> tanggal 27 April 2012.